

PERANAN PROFESI JURNALISME DALAM PENEGAKAN ETIKA PADA KEHIDUPAN PUBLIK

Ahmad Zamzamy

Progdi Ilmu Komunikasi FISIP-UPNV Jatim

Email: akhi_zamy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting peran profesi jurnalisme dalam menegakkan etika kehidupan publik. Landasan teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori etika. Penelitian ini juga membahas mengenai profesi, kode etik dan jurnalisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh secara kajian literatur yang relevan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kode etik dalam profesi jurnalisme terkait dengan pelayanan publik.

Kata kunci: *Profesi, Etika, Jurnalisme, Publik*

ABSTRACT

This study aims to find out just how important the role of journalism profession in upholding the ethics of public life. The foundation of the theory used in this study is the theory of ethics. This study also discusses the profession, codes of ethics and journalism. The method used in this study is qualitative descriptive. The source of research data obtained in the study of the relevant literature. Based on study that has been done, it can be concluded that there is a code of ethics in the profession of journalism associated with public services.

Key words: *Profession, Ethics, Journalism, Public*

PENDAHULUAN

Kita telah mengetahui bahwasanya pers di Indonesia mengalami euforia kebebasan sejak era reformasi berdiri. Apalagi ditambah dengan adanya penghapusan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dan lahirnya Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Akibatnya banyak bermunculan penerbitan media massa dan pekerja pers baru. Mereka saling berlomba untuk menyajikan informasi dan sesuatu lain yang menarik bagi publik.

Banyak kalangan muda yang mulai melirik profesi ini sehingga banyak didirikan sekolah-sekolah praktis kewartawanan. Selain berakibat positif, ternyata kebebasan pers juga

berakibat negatif. Ada beberapa media massa yang melakukan pemberitaan asal-asalan, tanpa mengindahkan etika dan tanpa mengikuti kode etik jurnalistik. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah profesi jurnalisme dapat berperan untuk menjaga tegaknya etika pada kehidupan publik?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh secara kajian literatur. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk hitungan lain dalam memperoleh

hasil temuannya. Penelitian deskriptif melukiskan fakta atau bidang tertentu secara cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 SM.) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Melihat keterangan etimologis ini, mungkin kita teringat bahwa dalam bahasa Indonesia pun kata *ethos* cukup banyak dipakai, misalnya dalam kombinasi *ethos* kerja, *ethos* profesi dan sebagainya. Memang ini suatu kata yang diterima dalam bahasa Indonesia dari bahasa Yunani (dan karena itu sebaiknya dipertahankan ejaan aslinya *ethos*), tapi tidak langsung melainkan melalui bahasa Inggris, di mana -- seperti dalam banyak bahasa modern lain -- kata itu termasuk kosakata yang baku.

Kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral. Kata terakhir ini berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti juga kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia (pertama kali dimuat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988), kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi, etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral, karena

keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya berbeda: yang pertama berasal dari bahasa Yunani, sedangkan yang kedua dari bahasa Latin. (Bertens, 1993: 4)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953), etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Jadi, kamus yang lama hanya mengenal satu arti, yaitu etika sebagai ilmu. Jika kita melihat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (*ibid*: 5)

Dari sini dapat disimpulkan, pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Secara singkat, arti ini bisa dirumuskan juga sebagai sistem nilai. Sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Dan ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. (*ibid*: 6)

Memahami etika pada dasarnya adalah bagian dari etika kita, yakni

berbuat sesuatu dengan alasan dan bila diminta kita dapat memberi alasan mengapa kita berbuat sesuatu. Jadi, tidaklah cukup bagi seseorang yang telah berumur delapan tahun, misalnya, hanya mengerjakan apa yang disuruh. Orang perlu mengetahui alasannya mengapa dia berbuat sesuatu dan juga harus berani mengatakan tidak bila disuruh melakukan perbuatan yang salah. Studi etika mengajarkan kita untuk dapat menghargai sistem alasan secara keseluruhan. Ini hanya dimungkinkan bila orang mempunyai etika. Memahami apa yang kita kerjakan berikut alasannya, dalam etika, sama pentingnya dengan berbuat itu sendiri.

Manfaat etika adalah memberikan sesuatu seperti apa yang diberikan oleh setiap ilmu pengetahuan, yaitu memenuhi keingintahuan manusia. Manusia ingin mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang sistematis, teratur dan mengenai gejala-gejala yang bersangkutan dengan dirinya. Salah satu di antaranya ialah kesusilaan. Oleh sementara ahli filsafat, gejala ini dianggap merupakan sesuatu yang sangat penting dan menarik karena ia menyebabkan kita bersentuhan dengan segi hakiki kehidupan manusia. Sesungguhnya manusia memang merupakan makhluk yang paling menarik bagi manusia itu sendiri. Jadi, tidak mengherankan bahwa hasrat terhadap pengetahuan terarah kepada manusia sebagai makhluk susila.

Manfaat etika kedua -- yang juga merupakan motif manusia -- ialah bahwa manusia secara terus-menerus melakukan perbuatan menurut ukuran-ukuran kesusilaan. Ini tampak pada kenyataan bahwa ia memberikan tanggapan atas perilakunya sebagai perilaku yang baik atau buruk, ketika ia kemudian sekali lagi merenungkannya. Dalam banyak peristiwa, manusia

melakukan perbuatan secara serta-merta tanpa merenungkan perilaku dan tanpa menyandarkan diri pada ukuran-ukuran kesusilaan yang seharusnya diikuti dalam perbuatannya.

Menjawab pertanyaan untuk tujuan apakah etika kita perlukan, Magnis Suseno, dkk. (1991: 4) menulis bahwa etika tidak langsung membuat kita menjadi manusia yang lebih baik -- karena hal itu adalah tugas ajaran moral -- melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Etika hendak menimbulkan suatu keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Lalu, mengenai apa sebenarnya peranan etika dalam dunia modern dengan sendirinya berkaitan pula dengan fungsi etika. Apabila kita memandang situasi etis dalam dunia modern, ada tiga ciri yang menonjol (Bertens, 1993: 31). Pertama, kita menyaksikan adanya pluralisme moral. Di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda (heterogen), nilai dan norma yang berbeda sering tampak pula. Bahkan sebaliknya, pada masyarakat yang sama (homogen), bisa terjadi pluralisme moral, yakni adanya pandangan yang berbeda-beda tentang nilai dan norma moral dalam satu masyarakat (Magnis Suseno, dkk., 1991: 9). Kedua, sekarang timbul banyak permasalahan etis baru yang dulu tak terduga. Ketiga, dalam dunia modern tampak semakin jelas pula adanya kepedulian etis yang universal. Ada tiga alasan pokok mengapa pluralisme semakin mencolok: 1) pandangan-pandangan moral yang berbeda-beda karena orang-orang dari suku, daerah, budaya dan agama yang berbeda hidup berdampingan dalam satu masyarakat dan negara; 2) modernisasi membawa perubahan besar dalam

struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang menantang pandangan-pandangan moral tradisional; 3) pelbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. (Sobur, 2001: 8)

Selanjutnya kita membahas mengenai profesi. Secara etimologis, istilah profesi (bahasa Inggris: *profession*) bersumber dari bahasa Latin, *professio*, yang secara harfiah berarti sumpah keagamaan. Kini, pengertian profesi tersebut tidak hanya mengandung makna keagamaan lagi, tetapi keilmuan. Pendapat lain mengartikan kata *professio* sebagai pengakuan atau pernyataan di depan umum atau semacam kesaksian di depan umum. Tampaknya, sekarang ini telah terjadi pergeseran arti kata profesi. Misalnya *Kamus Inggris-Indonesia* milik Echols dan Shadily, kata *profession* hanya diartikan sebagai: 1) pekerjaan; dan 2) pernyataan. Sedangkan kata *professional* diartikan sebagai 1) ahli; 2) sport: pemain bayaran. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 1995 pun kata profesi hanya disebutkan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb.) tertentu. Padahal kata profesi, *professio*, *profession* atau *professional* tidak menunjukkan pekerjaan, keahlian serta mata pencaharian dan yang serupa semata-mata. Kata tersebut sebenarnya berarti lebih luas daripada hanya pekerjaan, keahlian serta mata pencaharian tertentu. Secara terminologis, profesi dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau kedudukan, khususnya yang mensyaratkan pendidikan yang ekstensif dalam suatu cabang ilmu atau pekerjaan yang didasarkan pada keahlian suatu disiplin ilmu yang dapat diaplikasikan baik pada manusia maupun benda dan seni atau

suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. (*ibid*: 75-76)

Dalam prakteknya, penggunaan kata profesi masih agak kacau karena acapkali dikaitkan dengan pekerjaan seseorang yang memiliki mata pencaharian atau pekerjaan tukang parker, makelar, tukang las, rentenir bahkan WTS. Karena itu, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, paling tidak diperlukan: 1) pengetahuan; 2) penerapan keahlian; 3) tanggung jawab sosial; 4) pengawasan diri; dan 5) pengakuan oleh masyarakat. Bahkan definisi lain menyebutkan bahwa profesi harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu pengetahuan, ijazah dan lisensi serta badan pengawas.

Selain profesi, istilah lain yang juga acapkali disebut adalah profesional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 1995 mengartikan kata profesional sebagai 1) bersangkutan dengan profesi; 2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; dan 3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawannya amatir). Pengertian dan pembahasan kata profesional yang lebih jelas dapat kita temukan dalam buku karya David J. Leroy, *Journalism as a Profession*. Ia berujar bahwa ketika Walter Concrate (komentator televisi kenamaan) mengatakan “saya adalah seorang profesional”, baginya itu berarti ia mampu mengontrol emosi dan bias pada saat melakukan tugasnya. Ia mencari bahan siaran berita, lalu melaporkannya seadil dan seobjektif mungkin. Istilah tersebut juga menunjukkan bahwa seseorang dapat berperan dalam kondisi penuh tekanan. (*ibid*: 77)

Profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang

menuntut adanya pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik. Jelaslah bahwa semua profesi menuntut bidang ilmu tertentu yang ditekuni dalam waktu relatif lama serta dibaktikan kepada masyarakat secara kolektif. Di dalam batasan di atas terkandung unsur-unsur pengorbanan demi sesama manusia dan dedikasi atau pengabdian. Jadi, sesungguhnya tidak banyak jenis pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai profesi. (*ibid*: 81)

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus. Bagi klien yang mempergunakan jasa profesi tertentu keadaan seperti itu dapat mengakibatkan kecurigaan jangan-jangan ia dipermainkan. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi ini. Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral

profesi itu di mata masyarakat. (Bertens, 1993: 280-281)

Sekurang-kurangnya, ada empat manfaat kode etik yang kata-katanya disusun tepat, yakni pertama, kode etik dapat mendidik orang baru dalam suatu profesi atau bisnis dengan memperkenalkan mereka kepada pedoman tanggung jawab etis yang berdasarkan pengalaman pendahulu sehingga mereka peka terhadap masalah etika tertentu untuk bidangnya. Kedua, kode etik dapat mempersempit wilayah problematik sehingga seseorang harus berjuang. Tentu saja masalah etika yang lebih rumit dan tidak biasa masih tetap dipertimbangkan secara matang. Ketiga, proses pengembangan kode etik formal mungkin merupakan proses yang sehat yang mendukung peserta memikirkan tujuannya tentang cara yang dapat diperkenankan untuk mencapai tujuan itu dan tentang kewajibannya terhadap teman sejawat. Dan keempat, kode etik yang memadai dan efektif dapat memperkecil perlunya peraturan pemerintah yang tidak praktis dan bersifat mencampuri. (Johannesen, 1996: 182)

Institut Josephson untuk Kemajuan Etika mempublikasikan kode etik yang diusulkan “Nilai dan Prinsip Etika Pelayanan Publik”. Prinsip ini memasukkan karakteristik dan nilai yang sebagian besar orang menghubungkannya dengan perilaku etis. Keputusan etika mempertimbangkan secara sistematis beberapa prinsip yang mana, jika ada yang terkait. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu adalah:

- 1) Jujur. Orang yang jujur dapat dipercaya, bersungguh-sungguh, jujur, berterus terang, ramah, tulus; mereka tidak menipu, mencuri, berbohong, curang atau berbelit-belit.
- 2) Integritas. Orang yang berintegritas adalah yang mempunyai prinsip,

- terhormat dan jujur; mereka berani dan yakin bertindak; mereka akan berjuang untuk keyakinannya dan tidak akan mengambil filsafat membenarkan segala cara dengan mengabaikan prinsip atau menjadi berguna dengan mengorbankan prinsip, bermuka dua atau tidak bermoral.
- 3) Memegang janji. Orang yang patut dipercaya memegang janji, memenuhi janji, mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya; mereka tidak menafsirkan perjanjian dengan cara yang tidak masuk akal atau cara legalistic dengan tujuan untuk merasionalisasi ketidakrelaan atau melakukan pembenaran untuk mengelak dari komitmen mereka.
 - 4) Setia. Orang yang patut dipercaya menunjukkan kesetiaan dan kelayakan kepada orang atau institusi dengan cara berteman dalam duka, mendukung dan taat pada kewajiban; mereka tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi yang didengar dari kepercayaan demi keuntungan pribadi atau politis. Mereka melindungi kemampuan membuat penilaian profesional yang mandiri dengan teliti menghindari pengaruh dan pertentangan kepentingan yang tidak semestinya.
 - 5) Adil. Orang yang adil menunjukkan komitmen terhadap keadilan, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi dan menerima perbedaan dan mereka berpikiran terbuka; mereka mau mengakui kesalahan dan jika perlu mengubah sikap dan keyakinannya; mereka tidak melampaui batas yang ditentukan atau mengambil keuntungan yang tidak sepatutnya dari kesalahan atau kesulitan orang lain.
 - 6) Perhatian. Memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan menunjukkan kasih sayang, memberi kebaikan dan pelayanan; ia menghendaki kita berusaha membantu mereka yang membutuhkan dan menghindari menyakiti orang lain.
 - 7) Hormat. Orang yang etis menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia, privasi dan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap orang dewasa yang mampu; mereka sopan dan santun; mereka siap memberikan kepada orang lain informasi untuk mengambil keputusan yang tepat tentang kehidupannya sendiri.
 - 8) Kewarganegaraan. Dalam suatu demokrasi, kewarganegaraan yang bertanggung jawab merupakan sebuah kewajiban etis; meliputi sadar hukum (mematuhi hukum dan aturan masyarakat), berpartisipasi, (dengan memilih dan mengungkapkan pendapat yang cerdas), kesadaran sosial dan pelayanan umum; kaum profesional sektor publik mempunyai tanggung jawab tambahan untuk mendorong orang lain berpartisipasi, serta tanggung jawab khusus untuk menghargai dan menghormati proses pengambilan keputusan yang demokratis dan menghindari kerahasiaan yang tidak perlu atau menyembunyikan informasi, menjamin bahwa warga telah mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.
 - 9) Keunggulan. Orang yang etis memperhatikan kualitas pekerjaannya ; mereka mengejar keunggulan, rajin, dapat diandalkan, tekun dan bertanggung jawab. Seorang profesional sektor publik harus berpengetahuan dan siap melaksanakan wewenang publik.
 - 10) Akuntabilitas. Orang yang etis menerima tanggung jawab atas

keputusan, konsekuensi yang diduga dari tindakan dan kepasifan mereka dan memberi contoh kepada orang lain.

- 11) Menjaga kepercayaan publik. Orang-orang yang berada di sektor publik mempunyai kewajiban khusus untuk memelopori dengan cara menyontohkan, untuk menjaga dan meningkatkan integritas dan reputasi proses legislatif, untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak layak dan untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk membetulkan atau mencegah perilaku orang lain yang tidak layak. (Johannesen, 1996: 193-195)

Tidak lupa kita juga membahas mengenai jurnalisme. Saat Abad Pertengahan berakhir, berita datang dalam bentuk lagu dan cerita, dalam balada-balada yang disenandungkan pengamen keliling. Apa yang mungkin kita anggap sebagai jurnalisme modern mulai muncul pada awal abad ke-17 dan betul-betul lahir dari perbincangan, terutama di tempat publik seperti kafe di Inggris, kemudian di pub atau kedai minum di Amerika. Surat kabar pertama muncul dari kafe-kefe ini sekitar 1609, ketika percetakan mulai mengumpulkan berita perkapalan, gossip dan argumen politik dari kafe dan mencetaknya di atas kertas. Dengan evolusi surat kabar-surat kabar pertama, politisi Inggris mulai membicarakan sebuah fenomena baru yang mereka sebut opini publik. Pada awal abad ke-18, wartawan/penerbit mulai memformulasikan teori kebebasan berbicara dan pers bebas. Terdapat ide yang terkenal bahwa kebenaran harus bisa menjadi pertahanan melawan pencemaran nama baik. (Kovach & Rosenstiel, 2003: 17-18)

Pada tahun 1960-an muncul jurnalisme baru yang dirintis oleh para wartawan senior di Amerika. Hal ini

dikarenakan kebosanan mereka terhadap standar baku dalam melakukan tugas peliputan dan penulisan berita. Kebosanan itu juga melanda terkait tata kerja jurnalisme lama yang dianggap kaku dan membatasi ruang gerak wartawan, teknik penulisan dan bentuk laporan berita.

Era jurnalisme lama -- bisa juga disebut dengan jurnalisme konvensional -- menempatkan ideologi objektivitas sebagai landasan utama dalam beroperasi. Tolok ukurnya adalah dua dimensi, yaitu faktualitas (*factuality*) dan imparsialitas (*impartiality*) (Masduki, 2008: 172). Cara kerja wartawan hanya terfokus pada kegiatan reportase berupa pencatatan peristiwa berdasarkan fakta dan memuat pemberitaannya di media massa. Kebosanan pada ritme kerja yang monoton ini membuat para perintis jurnalisme baru mulai melakukan inovasi dalam penyajian berita sehingga tak melulu *realtime* terhadap fakta peristiwa dalam gaya penulisan *straight news*. Mereka melakukan inovasi dalam bentuk tulisan, penyajian serta teknik liputan lebih mendalam dan menyeluruh. Jurnalisme baru merupakan respon global mengusung kritik tajam atas klaim objektivitas-positivisme sehingga memunculkan genre baru dalam jurnalisme.

Kini, wartawan dapat mengembangkan berbagai bentuk teknik jurnalisme baru dalam peliputan dan pelaporan berita ke dalam gaya jurnalisme yang lebih bersemangat dan memberi pengetahuan tambahan bagi khalayak untuk ikut berperan aktif dalam menganalisa berita. Di dalam jurnalisme baru ini, wartawan dapat membuat berbagai bentuk pencarian berita sesuai teknik jurnalistiknya dengan gaya atau kreasi masing-masing sehingga berita menjadi lebih luwes dan tidak kaku. Bagaimanapun, di era

jurnalisme baru ini wartawan dapat berfungsi menciptakan opini publik dan meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui senjata berupa tulisannya itulah wartawan menjadi mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau instansi tertentu yang bertikai.

Fredler di dalam bukunya *An Introduction to The mass Media* merumuskan jurnalisme baru ke dalam empat fase, yaitu *advocacy journalism*, *alternative journalism*, *precision journalism* dan *literary journalism*. Adapun Everette Dennis dalam bukunya *Magic Writing Machine* membagi jurnalisme baru ke dalam lima jenis, yaitu jurnalisme non-fiksi baru (berupa reportase para jurnalis), jurnalisme alternatif, jurnalisme advokasi, jurnalisme bawah tanah dan jurnalisme presisi. Kemudian muncul istilah jurnalisme empati, jurnalisme perang/kekerasan dan jurnalisme damai yang diucapkan oleh beberapa wartawan senior seperti Jacob Oetama dan Atmakusumah. Penambahan jurnalisme baru ini memberi warna baru bagi para wartawan dalam teknik peliputan berita masa kini sehingga menjadi lebih luwes dan membuka ruang gerak yang lebih besar bagi masuknya istilah lain di dalam era jurnalisme baru. (Setiati, 2005: 43-45)

Tujuan utama di antara semua tujuan jurnalisme adalah menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Untuk memenuhi tugas ini:

- 1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.
- 2) Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga.
- 3) Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi.
- 4) Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita.

- 5) Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan.
- 6) Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga.
- 7) Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan.
- 8) Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional.
- 9) Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. (Kovach & Rosenstiel, 2003: 6)

Ada empat keunggulan media massa, yaitu:

- 1) Media berfungsi sebagai *issue intensifier*. Di sini media berpotensi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Dengan posisinya sebagai *intensifier*, media dapat mem-*blow up* realita menjadi isu sehingga dimensi isu menjadi transparan.
- 2) Media berfungsi sebagai *conflict diminisher*. Media dapat menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja, media juga dapat meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau lainnya.
- 3) Media berfungsi menjadi pengarah *conflict resolution*. Media menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.
- 4) Media berfungsi sebagai pembentuk opini publik. (Setiati, 2005: 68)

Jurnalisme berkaitan erat dengan pelayanan publik. Ada tiga ciri umum yang menandai publik. Pertama, ada perbedaan kualitatif antara kegiatan yang diakui sebagai pelayanan publik dan kegiatan yang datang dari inisiatif dan tujuan pribadi atau swasta. Kedua, perbedaan pelayanan publik ini berarti

lebih penting dibanding dengan kegiatan lain sejenis, maka diatur secara khusus. Dan ketiga, pelayanan publik mempunyai legitimasi publik yang melekat pada kekuasaan negara. Menurut B. Libois, prinsip pelayanan publik ada tiga, yaitu kontinuitas, kesetaraan dan adaptif. Kontinuitas dipahami sebagai tidak boleh berhenti sama sekali meskipun ada pemogokan. Jadi, pelayanan tetap dijalankan (setidaknya pelayanan minimum) meski harus berhadapan dengan hak pekerja untuk mogok atau kepentingan keuangan perusahaan. Kesetaraan berarti tiadanya diskriminasi dalam hal isi atau yang mengisi hanya atas dasar identitas dan universalitas dalam mendefinisikan yang masuk kategori publik dan zona geografis. Adaptif berarti selalu mengikuti perkembangan kebutuhan sosial, bahkan mungkin harus meninggalkan kegiatan tertentu bila dapat dijamin dan secara sosial bisa diterima oleh pelaku lain. Prinsip ini menjaga keseimbangan pelayanan publik antara kolektivisme dan liberalisme ekonomi (tuntutan pasar) agar bisa mencapai tujuan kolektif. Sedangkan dalam media, selain ketiga prinsip itu, masih ditambah satu lagi, yaitu netralitas.

Prinsip netralitas dimaksudkan untuk mengkondisikan aktivitas dan bukan berfungsinya pelayanan publik media. Logikanya ialah mau menempatkan pelayanan dalam situasi sedemikian rupa sehingga media tidak dimungkinkan hanya memberi prioritas pada satu visi tentang dunia atau kepentingan satu kelompok tertentu. Netralitas ini bisa berupa tuntutan yang terkait dengan keseluruhan program agar memenuhi kewajiban objektivitas informasi. Netral berarti para operatornya dan pelayanannya tidak memihak, tetapi bukan berarti dalam hal program atau

isinya. Media massa memiliki banyak peran (Setiati, 2005: 69). Pertama, media wajib menyampaikan informasi yang jujur dan benar sesuai dengan fakta peristiwa kepada masyarakat; media harus bisa mencerahkan pikiran pembaca dengan mengungkap fakta dan peristiwa secara berimbang. Kedua, dalam pengungkapan suatu peristiwa, media memiliki tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi. Ketiga, media harus bisa menjadi mata dan hati bagi publik, bukan mata dan hati pasar. Keempat, karena media merupakan bagian dari publik, maka media berhak untuk mengetahui kinerja pelayanan publik. Kelima, media harus bisa memuat pemberitaan yang seimbang, tidak bias gender dan bisa memberi empati, khususnya kepada kaum wanita dan anak-anak. Keenam, media memiliki fungsi sosial, yaitu pengamat sosial, korelasi sosial, sosialisasi dan hiburan. Ketujuh, media harus bisa menjadi saluran komunikasi dalam pemecahan konflik. Kedelapan, media bisa memosisikan dirinya sebagai lembaga mediator di tengah khalayak masyarakat. Kesembilan, media dapat menjadi sarana kampanye yang efektif kepada masyarakat. Kesepuluh, media sebagai bagian sistem pasar harus jeli menampilkan pemberitaan yang dapat memikat. Kesebelas, media dapat berperan dalam mengkonstruksi suatu peristiwa untuk pembentukan realitas sosial. Kedua belas, media memiliki *social responsibility*. Ketiga belas, media bisa menerapkan *media accountability* yang riil pada publik.

Berhadapan dengan melimpahnya informasi, peran media sebagai pelayanan publik adalah membantu menyeleksi dan memunculkan unsur yang bermakna agar tidak tergelincir ke dalam disinformasi akibat dari banyaknya hal yang harus diingat. Semua orang tahu

bahwa informasi pertama-tama adalah konstruksi yang riil, membentuk makna dari yang diperoleh melalui media. Sebelum menyiarkan fakta, langkah yang dilakukan ialah menyeleksi dan membangun fakta. (Haryatmoko, 2007: 157)

Ranah jurnalisme memang mempunyai kekhasannya dibandingkan dengan bentuk produksi budaya yang lain. Ada tiga hal yang menandai kekhasan jurnalisme yang terkait langsung dengan etika komunikasi. Pertama, jurnalisme sangat tergantung pada tekanan kekuatan dari luar, yaitu hukum permintaan. Maka sangat ditentukan oleh sanksi pasar dan plebisit pemirsa. Kedua, perbedaan kutub dengan orientasi komersial atau tidak terasa sangat kuat sehingga keuntungan lebih dinikmati oleh orientasi komersial, bahkan kualitas sering diukur dari kekuatan finansialnya; kecenderungannya lalu menganggap kemampuan membentuk opini publik disamakan dengan kekuatan finansial. Ketiga, suasana profesi sangat diwarnai oleh berlakunya keadilan imanen (semacam hukum karma). Prinsip ini mau meyakinkan bahwa mereka yang melanggar larangan tertentu akan terkena tulah dengan sendirinya, sedangkan yang menyesuaikan diri dengan aturan main sangat dipuji dan dihargai. Ketiga warna kekhasan jurnalisme ini kuat terkait dengan etika komunikasi karena bila terlalu menekankan pasar, plebisit akan mendatangkan sanksi. Interaksi di antara wartawan dan rekan seprofesi yang memperhitungkan secara serius berlakunya keadilan imanen akan makin memperkuat deontologi profesi. (*ibid*: 159-160)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka

kesimpulannya adalah adanya kode etik yang terdapat dalam profesi jurnalisme terkait dengan pelayanan publik. Hal itu dapat terlihat dalam publikasi kode etik yang diusulkan “Nilai dan Prinsip Etika Pelayanan Publik” oleh Institut Josephson untuk Kemajuan Etika. Ditambah pula dengan pedoman sembilan elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Kovach & Rosenstiel. Diharapkan bagi yang terlibat dalam profesi jurnalisme dapat mengamalkan kode etik tersebut dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K., 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko, 2007. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Johannesen, Richard L. 1996. *Etika Komunikasi*. Ed. Dedi Djamaluddin Malik dan Deddy Mulyana. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kovach, Bill & Tom Rosenstiel, 2003. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Terj. Yusi A. Pareanom. Ed. Andreas Harsono. Jakarta: Yayasan Pantau, Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- Magnis Suseno, Franz, dkk., 1991. *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Masduki & Muzayin Nazaruddin, 2008. *Media, Jurnalisme dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia & UII Press
- Setiati, Eni, 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: Andi
- Sobur, Alex, 2001. *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press.